Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik

Khusnul Khuluq [1)], Sri Kamariyah [2)], Ika Devy Pramudiana [3)]
[1) 2) 3)] Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya
Email: khusnulk@gmail.com

ABSTRAK

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan salah satu bentuk penerapan *e-government* dalam rangka mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan pengelolaan keuangan yang bersih, efektif, dan efisien sesuai konsep *value for money*. Pemerintah Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, menerapkan SIPKD dalam pengelolaan keuangan daerah sejak tahun 2014. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, dan efisien, di samping laporan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel dan auditabel. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan bertujuan untuk mengetahui apakah implementasi penyusunan laporan keuangan di Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, dengan menerapkan SIPKD sudah efektif, serta untuk mengetahui kendala dalam penyusunan laporan keuangan dengan menerapkan SIPKD. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa analisis penerapan SIPKD pada Pemerintah Kecamatan Dukun, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor: 270/PMK.05/2014, menunjukkan bahwa saat menjalankan aplikasi SIPKD secara bersamaan, proses menjadi sangat lambat bahkan kadang error. Hal ini dikarenakan bandwidth server yang kurang besar dan tidak ada peringatan (*warning system*) dari aplikasi SIPKD pada saat terjadi kesalahan proses input data. Berdasarkan penemuan yang diungkapkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem SIPKD pada Pemerintah Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, sudah berjalan dengan baik. Namun, terdapat beberapa hal yang masih harus diperbaiki. Sebaiknya pengelola server pusat perlu menambah kapasitas bandwidth server sehingga saat dipakai bersamaan oleh seluruh OPD, aplikasi tetap berjalan lancar. Selain itu, perlu dilakukan penyempurnaan sistem operasi aplikasi SIPKD.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, SIPKD, Kualitas Laporan, Keuangan Daerah

Abstract

The Regional Financial Management Information System (SIPKD) is one of the forms of e-government implementation aimed at encouraging local governments to implement clean, effective, and efficient financial management in accordance with the concept of value for money. The Dukun Sub-district Government, Gresik Regency, has implemented SIPKD in regional financial management since 2014. This is done to achieve transparent, effective, and efficient financial management, as well as accountable and auditable financial accountability reports. This study uses a qualitative descriptive research method and aims to determine whether the implementation of financial report preparation in Dukun Sub-district, Gresik Regency, with the application of SIPKD has been effective, and to identify the challenges in preparing financial reports with SIPKD. The analysis results in this study show that the analysis of SIPKD implementation in the Dukun Sub-district Government, based on the Indonesian Minister of Finance Regulation No. 270/PMK.05/2014, indicates that when the SIPKD application is run simultaneously, the process becomes very slow and sometimes errors occur. This is due to insufficient server bandwidth and the absence of a warning system in the SIPKD application when input data errors occur. Based on the findings above, it can be concluded that the implementation of the SIPKD system in the Dukun Sub-district Government, Gresik Regency, has been running well. However, there are several areas that still need improvement. It is advisable for the central server manager to increase the server bandwidth capacity so that when used simultaneously by all OPDs, the application runs smoothly. Additionally, improvements to the SIPKD application's operating system should be made.

Keywords: Policy Implementation, SIPKD, Quality of Financial Reports, Regional Finance

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*), Pemerintah Daerah harus terus melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Daerah. Hal ini sesuai dengan harapan masyarakat dan peraturan yang berlaku, yang mengharuskan Pemerintah Daerah untuk lebih terbuka dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan publik. Salah satu bentuk upaya transparansi dan akuntabilitas ini adalah dengan menghasilkan laporan keuangan yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan (Safrida Yuliani, 2021).

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang mencerminkan kondisi keuangan suatu daerah. Laporan tersebut terdiri dari neraca, laporan rugi laba, dan laporan perubahan ekuitas, yang digunakan untuk pengambilan keputusan yang bertujuan mencapai tujuan pembangunan daerah. Laporan ini dapat disajikan dalam bentuk cetakan komputer atau tayangan pada layar monitor komputer, dan sering kali digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti lembaga pemerintah, auditor, serta masyarakat untuk menentukan kebijakan atau keputusan lebih lanjut (Desiana Wati, 2020).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 1 mengenai ketentuan umum, disebutkan bahwa keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah sebagai pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Tujuannya adalah untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan Negara dan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah (Ni Made Rika Krisna Dewi, 2022).

Pemerintah selaku perumus dan pelaksana kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang terbuka dan bertanggung jawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan pembangunan. Salah satu cara untuk memenuhi kewajiban tersebut adalah dengan menyediakan informasi keuangan yang komprehensif kepada masyarakat luas, termasuk informasi keuangan Daerah. Pemerintah juga dapat memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat guna mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien.

Perumusan kebijakan APBD yang berupa regulasi dalam bidang pengelolaan keuangan Daerah menjadi dasar bagi setiap Pemerintah Daerah untuk mengelola keuangan Daerahnya. Pedoman pengelolaan keuangan Daerah yang tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan setiap Daerah untuk melaksanakan anggarannya secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam konteks ini, setiap daerah harus mendukung pengelolaan keuangan dengan sistem yang cepat, tepat, dan akurat.

Sistem informasi adalah suatu sistem yang ada dalam suatu organisasi yang dapat mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi yang bersifat manajerial, serta kegiatan strategis dari suatu organisasi dan pihak luar. Sistem ini menyediakan laporan yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik (Ais Zakiyudin, 2022). Dalam hal ini, Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah (Rosmery Elsye, 2019). Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah sebuah sistem terpadu yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas implementasi regulasi dalam pengelolaan keuangan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Gresik, khususnya di Kecamatan Dukun, telah mulai menerapkan aplikasi SIPKD untuk mempermudah staf akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penginputan data-data keuangan. Sebelumnya, staf harus datang langsung ke kantor BPPKAD Kabupaten Gresik untuk memasukkan data, namun dengan aplikasi SIPKD ini, mereka dapat mengakses aplikasi tersebut langsung dari kantor masing-masing. Hal ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data keuangan daerah.

Namun, implementasi SIPKD di Kabupaten Gresik, khususnya di Kecamatan Dukun, tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Beberapa kendala masih muncul dalam proses penggunaan aplikasi ini. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah ketika aplikasi dijalankan secara bersamaan oleh banyak pengguna, proses menjadi sangat lambat dan sering kali terjadi error. Hal ini disebabkan oleh kapasitas bandwidth server yang terbatas, serta tidak adanya sistem peringatan yang memberitahukan adanya kesalahan input data. Akibatnya, banyak SKPD mengalami kesulitan dalam memasukkan data yang menyebabkan keterlambatan dan ketidaktepatan dalam pelaporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mengambil judul "Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik". Penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana aplikasi SIPKD dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan di Kecamatan Dukun, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang ada dalam proses pelaporan keuangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui aplikasi SIPKD.

B. LANDASAN TEORITIS

1. Teori Kebijakan Publik

Menurut Dwiyanto Indiahono (2009), kebijakan publik dalam kerangka substantif adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang dihadapinya. Dengan membawa kebijakan publik ke ranah upaya pemecahan masalah publik, maka warna administrasi publik akan terasa lebih kental.

Sementara itu, Thomas Dye (1992) dalam (Anggara, 2018) mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah. Alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian. Di sinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Carl Friedrich dalam (Wahab, 2012) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu, sehubungan dengan hambatan-hambatan tertentu, seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

James E. Anderson (1979) dalam buku analisis kebijakan publik Subarsono (2013) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Sedangkan menurut Eystone (1971) dalam Wahab (2012), kebijakan publik dirumuskan secara singkat, yaitu *the relationship of governmental unit to its environment* (hubungan yang berlangsung di antara unit atau satuan pemerintahan dengan lingkungannya).

Pengertian di atas menekankan bahwa kebijakan publik merupakan upaya yang ditempuh pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan publik. Melalui perencanaan manajemen yang baik, pemerintah dapat melihat keadaan ke depan, memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, serta menjabarkan kegiatan dan membuat urutan prioritas utama yang ingin

dicapai oleh organisasi. Menurut Riant Nugroho (2003), kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Jadi, jika cita-cita bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan) serta UUD (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang berdasarkan hukum dan bukan semata-mata kekuasaan, maka kebijakan publik adalah seluruh prasarana dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang memiliki tujuan tertentu, berorientasi pada kepentingan seluruh masyarakat. Kebijakan pemerintah merupakan pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Oleh karena itu, hanya pemerintah yang dapat melakukan sesuatu dengan sah untuk masyarakat, dan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah tersebut merupakan pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.

Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan akan mempengaruhi kinerja dari suatu kebijakan. Strategi yang digunakan dapat bersifat *top-down approach* atau *bottom-up approach*, otoriter atau demokratis. Kebijakan publik umumnya dapat dipahami sebagai salah satu tindakan pemerintah yang dibuat berdasarkan tugas pemerintahannya dalam bentuk pengaturan ataupun keputusan. Kebijakan publik adalah keputusan yang mengikat bagi banyak orang, yang dibuat di tataran strategis oleh pemegang otoritas publik. Dalam praktiknya, kebijakan publik adalah hasil dari suatu proses politik yang dijalankan dalam suatu sistem pemerintahan.

Dalam sistem tersebut terdapat upaya yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah, yang berperan sebagai penyelenggara negara. Kebijakan publik juga tidak lepas dari peran dan fungsi birokrasi. Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh negara ataupun pemerintah. Meskipun kebijakan tidak hadir secara konkret seperti halnya kita melihat, memotret, atau meraba benda yang ada di sekitar kita, kebijakan publik adalah sesuatu yang berkesinambungan dalam kehidupan antara pemerintah dan rakyat.

Dalam praktiknya, kebijakan publik adalah hasil dari suatu proses politik yang dijalankan dalam suatu sistem pemerintahan. Di dalam sistem tersebut terdapat upaya yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah, yang berperan sebagai penyelenggara negara. Kebijakan publik juga tidak lepas dari peran dan fungsi birokrasi. Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh negara ataupun pemerintah. Meskipun kebijakan tidak hadir secara konkret seperti halnya kita melihat, memotret, atau meraba benda yang ada di sekitar kita, kebijakan publik adalah sesuatu yang berkesinambungan dalam kehidupan antara pemerintah dan rakyat.

2. Elemen Kebijakan Publik

Kerangka kebijakan publik menurut Subarsono (2013) ditentukan oleh beberapa elemen, yakni:

a) Tujuan yang akan dicapai. Ini mencakup kompleksitas tujuan yang akan dicapai. Apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, maka akan semakin sulit mencapai kinerja kebijakan. Sebaliknya, apabila tujuan kebijakan semakin sederhana, maka semakin mudah untuk mencapainya.
b) Preferensi nilai yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan. Suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit untuk dicapai dibandingkan dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar satu nilai.
c) Sumber daya yang mendukung kebijakan. Kinerja dalam suatu kebijakan akan

ditentukan oleh sumber daya finansial, material, dan infrastruktur lainnya.

d) Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas para aktor yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan. Kualitas akan ditentukan dari tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya.

e) Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kinerja dari suatu kebijakan. Strategi yang digunakan dapat bersifat *top-down approach atau bottom-up approach*, otoriter atau demokratis.

3. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor, sehingga pada akhirnya akan menghasilkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri. Teori dari ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu Teori George C. Edward III (dalam Sudarsono, 2021), berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, antara lain:

a) Komunikasi

Komunikasi yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga dapat mengurangi distorsi implementasi.

b) Sumber daya

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, seperti kompetensi implementor, dan sumber daya finansial.

c) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Sebaliknya, ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red tape*, yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut pandangan Edwards (dalam Budi Winarno, 2020), sumber-sumber yang penting meliputi staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang, dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas guna melaksanakan pelayanan publik. Struktur Birokrasi memiliki dua karakteristik utama, yakni *Standard Operating Procedures* (SOP) dan Fragmentasi.

Standard Operating Procedures (SOP) adalah prosedur-prosedur kerja ukuran dasar berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber daya para pelaksana, serta keinginan untuk

keseragaman dalam bekerja pada organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas.

Sedangkan, fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara, dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi Pemerintah.

4. Pengertian Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah seluruh hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kekayaan daerah yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah mencakup penerimaan dan pengeluaran yang berasal dari berbagai sumber, baik dari pusat maupun daerah itu sendiri. Sumber-sumber tersebut meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pendapatan lainnya yang sah. Pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan yang transparan dan akuntabel (Kepmenkeu, 2010:12).

Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan prinsip-prinsip tertentu, seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Hal ini mengacu pada upaya agar pengelolaan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan tidak disalahgunakan. Sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik, pengelolaan keuangan daerah juga mengharuskan adanya pengawasan yang ketat, baik dari internal pemerintah daerah maupun dari pihak eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam hal ini, keuangan daerah diharapkan dapat digunakan secara optimal untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas layanan publik (Winarno, 2018:45).

Selain itu, pengelolaan keuangan daerah yang baik juga berperan dalam meningkatkan efisiensi dalam pengalokasian dana untuk berbagai program pembangunan. Pemerintah daerah harus menyusun anggaran dengan teliti dan memprioritaskan kebutuhan yang paling mendesak. Dengan pengelolaan yang baik, keuangan daerah dapat memberikan dampak positif pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti meningkatkan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lainnya yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah memerlukan kerjasama yang solid antar pemerintah daerah, lembaga terkait, serta masyarakat sebagai penerima manfaatnya (Sudirman, 2017:88).

5. Indikator Laporan Keuangan Daerah

Indikator laporan keuangan daerah merupakan ukuran atau parameter yang digunakan untuk menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah serta tingkat akuntabilitasnya. Menurut Mahmudi (2016:98), terdapat beberapa indikator penting dalam laporan keuangan daerah, meliputi:

a) Relevansi

Menurut Mahmudi (2016:98), relevansi mengacu pada sejauh mana laporan keuangan memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang relevan harus mampu memberikan prediksi dan umpan balik bagi pengguna dalam menilai kondisi keuangan daerah.

b) Keandalan

Keandalan menunjukkan bahwa informasi dalam laporan keuangan bebas dari kesalahan material dan dapat dipercaya. Informasi yang disajikan harus mencerminkan kondisi keuangan yang sesungguhnya tanpa adanya manipulasi (Mahmudi, 2016:98).

c) Daya Banding

Laporan keuangan harus memiliki daya banding, baik antar periode maupun

antar entitas pemerintahan. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi perkembangan keuangan daerah secara konsisten (Mahmudi, 2016:98).

d) Keterpahaman

Menurut Halim (2019:112), keterpahaman mengacu pada sejauh mana laporan keuangan dapat dimengerti oleh pengguna, termasuk masyarakat umum, legislatif, dan pemerintah daerah. Informasi harus disajikan secara jelas tanpa kehilangan makna akibat kerumitan laporan.

e) Penyajian Anggaran

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, penyajian laporan keuangan harus mencerminkan realisasi anggaran yang sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga pengguna dapat menilai kesesuaian antara anggaran dan realisasi.

f) Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Laporan keuangan daerah harus menunjukkan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku. Kepatuhan ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan mencegah penyalahgunaan dana publik (Mardiasmo, 2018:137).

g) Pencatatan Aset dan Kewajiban

Laporan keuangan harus menyajikan informasi mengenai pengelolaan aset dan kewajiban secara transparan. Hal ini bertujuan untuk memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah (Mardiasmo, 2018:137).

6. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas untuk membantu para pengguna dalam pengambilan keputusan. Menurut Mahmudi (2016:72), laporan keuangan dirancang untuk memberikan gambaran yang transparan tentang kondisi keuangan organisasi, baik dalam lingkup pemerintahan maupun sektor swasta. Informasi tersebut digunakan oleh berbagai pihak, seperti manajer, investor, kreditur, dan masyarakat, untuk mengevaluasi kinerja keuangan entitas dan membuat keputusan yang berhubungan dengan alokasi sumber daya.

Halim (2019:105) menyatakan bahwa laporan keuangan bertujuan untuk memenuhi akuntabilitas publik, khususnya dalam sektor pemerintahan. Laporan keuangan pemerintah daerah, misalnya, menjadi sarana pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran yang dilakukan selama satu periode. Selain itu, laporan ini juga menjadi alat evaluasi untuk mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan dana publik, memastikan bahwa pengeluaran telah sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku.

Menurut Mardiasmo (2018:84), tujuan utama laporan keuangan adalah memberikan informasi yang berguna bagi para pengambil keputusan. Informasi tersebut mencakup aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban yang memungkinkan pengguna untuk menilai kemampuan entitas dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, laporan keuangan juga bertujuan untuk membantu pengguna memahami kondisi keuangan entitas secara keseluruhan, termasuk risiko yang mungkin dihadapi dan peluang yang tersedia untuk mendukung kelangsungan operasional di masa mendatang.

7. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan perangkat teknologi yang dirancang untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan di tingkat pemerintahan daerah secara modern, akuntabel, dan transparan. Menurut Halim (2019:153), SIPKD bertujuan untuk mempermudah proses perencanaan,

pelaksanaan, hingga pelaporan anggaran dengan menyediakan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan dapat diakses dengan cepat. Sistem ini menjadi salah satu alat penting dalam mendukung transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Mahmudi (2016:217) menjelaskan bahwa SIPKD berfungsi untuk mengintegrasikan seluruh data keuangan daerah dalam satu platform terpadu, mulai dari penganggaran, pencatatan transaksi, hingga pelaporan dan evaluasi. Dengan dukungan teknologi informasi, SIPKD meminimalkan potensi kesalahan manusia, mempercepat proses administrasi keuangan, dan memberikan kemudahan dalam pemantauan anggaran. Selain itu, sistem ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, auditor, dan masyarakat, dalam memperoleh informasi keuangan secara *real-time*.

Mardiasmo (2018:183) menekankan bahwa penerapan SIPKD merupakan langkah strategis dalam mendorong akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah. Sistem ini membantu pemerintah daerah memastikan pengelolaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meningkatkan kepercayaan publik, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Lebih lanjut, SIPKD juga memainkan peran penting dalam pengendalian internal, karena semua aktivitas keuangan tercatat secara digital, memungkinkan evaluasi dan pengawasan dilakukan dengan lebih mudah dan efektif. Selain itu, SIPKD memungkinkan pemerintah daerah menyesuaikan perencanaan keuangan dengan kebutuhan masyarakat, menciptakan proses pengelolaan yang lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan.

Menurut Rohman dan Harun (2020:99), SIPKD dirancang untuk menyederhanakan birokrasi dan meningkatkan koordinasi antarlembaga di tingkat daerah. Dengan integrasi data yang baik, sistem ini memungkinkan harmonisasi kebijakan anggaran antara pemerintah daerah dan pusat, sehingga menciptakan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan. Kehadiran SIPKD juga memperkuat fungsi kontrol dalam pengelolaan keuangan daerah, memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, SIPKD adalah solusi inovatif yang mendukung transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu teknis, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Dengan demikian, SIPKD memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan.

8. Standar Akuntansi Pemerintah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan berkualitas apabila bersifat relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan, antara lain sebagai berikut:

a) Relevan
Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat memengaruhi pengambilan keputusan pengguna ataupun manajerial. Informasi tersebut juga digunakan untuk membantu mereka dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, dan memprediksi masa yang akan datang. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud dari penggunaannya.

b) Andal
Keandalan suatu informasi dalam laporan keuangan berarti bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material. Fakta dalam informasi harus disajikan secara jujur dan

apa adanya, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi.

c) Dapat Dipahami

Suatu informasi dalam laporan keuangan dapat dikatakan bermanfaat apabila informasi yang disajikan mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Informasi tersebut dinyatakan dalam istilah yang disesuaikan dengan kemampuan pemahaman dan pengetahuan pengguna.

d) Dapat Dibandingkan

Suatu informasi dalam laporan keuangan dikatakan bermanfaat jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya ataupun dengan laporan keuangan entitas lain yang sejenis.

Apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, itu berarti pemerintah daerah sudah mampu mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Pemerintah daerah harus menghasilkan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila belum sesuai dengan perundang-undangan, hal ini dapat mengakibatkan kerugian daerah yang besar, kelemahan administrasi, pemborosan yang luar biasa, serta penggunaan waktu yang tidak efisien dan tidak efektif.

C. METODE

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu atau frekuensi yang terjadi pada suatu aspek efektivitas tertentu, sekaligus pula mendeskripsikan secara terperinci efektivitas tersebut melalui uraian dengan argumen yang jelas.

Menurut Purnomo Adi (2019), pendekatan deskriptif kualitatif merupakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang diartikan menggunakan kata-kata menurut responden, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitiannya, kemudian dianalisis pula dengan kata-kata yang melatarbelakangi. Oleh karena itu, penulis berusaha menggambarkan kondisi dan situasi yang timbul pada objek sehingga dapat diperoleh sebuah kesimpulan jelas mengenai penelitian yang dimaksud, yaitu Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik.

2. Fokus Penelitian

Fokus utama penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) terhadap kualitas laporan keuangan di Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, dengan mengacu pada teori implementasi kebijakan berperspektif *top-down* yang dikembangkan oleh George C. Edward III.

Penelitian ini menekankan pada empat faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yang saling berhubungan satu sama lain. Faktor pertama adalah komunikasi, yang memainkan peran penting dalam memastikan bahwa program dapat dilaksanakan dengan baik. Komunikasi yang jelas dan konsisten sangat diperlukan agar informasi yang disampaikan kepada pelaksana dapat dipahami dengan tepat. Faktor kedua adalah sumber daya, yang mencakup staf yang cukup dan berkualitas, informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan, kewenangan yang memadai untuk menjalankan tanggung jawab, serta fasilitas yang mendukung kelancaran pelaksanaan program. Faktor ketiga adalah disposisi, yang mencakup sikap dan komitmen dari pelaksana program, khususnya aparatur birokrasi. Sikap yang positif dan komitmen yang kuat terhadap program dapat mempengaruhi keberhasilan

implementasi. Faktor terakhir adalah struktur birokrasi, yang mencakup adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan program. Keempat faktor ini diharapkan dapat saling mendukung untuk menghasilkan kualitas laporan keuangan yang optimal melalui implementasi SIPKD.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data serta informasi yang berkaitan dengan data, responden, serta informan penelitian. Sesuai dengan permasalahan yang terjadi, maka lokasi penelitian ini dilakukan pada Kantor Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, beralamat di Jalan Raya Dukun No. 04, Gresik. Adapun alasan dipilihnya lokasi penelitian ini adalah karena Kantor Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah pelaksana Aplikasi SIPKD di Kantor Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

Penelitian ini mengevaluasi implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, dengan tujuan untuk menilai dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ini telah diterima dengan baik oleh sebagian besar pihak terkait, meskipun tantangan dalam hal pemahaman dan adaptasi terhadap teknologi baru masih ada. Sistem ini dirancang untuk menggantikan metode manual dalam pengelolaan keuangan daerah, yang sebelumnya dianggap lambat, rawan kesalahan, dan kurang transparan. Dengan penggunaan SIPKD, pengelolaan keuangan menjadi lebih efisien, terstruktur, dan berbasis data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Implementasi SIPKD secara langsung berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Data yang dikelola melalui sistem ini menunjukkan tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem manual sebelumnya. Proses penyusunan laporan keuangan yang dulunya memakan waktu lama kini dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat, dan laporan yang dihasilkan menjadi lebih lengkap dan terintegrasi. Hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memudahkan pengawasan oleh pihak yang berwenang, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pihak-pihak terkait lainnya. Dengan kualitas laporan yang semakin baik, diharapkan tercapai akuntabilitas yang lebih tinggi dalam pengelolaan anggaran daerah.

Namun, meskipun SIPKD memberikan banyak manfaat, terdapat sejumlah tantangan yang harus diatasi. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan teknis yang memadai. Beberapa staf pengelola keuangan di Kecamatan Dukun mengungkapkan kesulitan dalam mengoperasikan sistem karena mereka belum terbiasa dengan teknologi informasi. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan dan peningkatan kapasitas pengguna menjadi hal yang sangat penting. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun ada pelatihan awal, pemahaman yang mendalam dan keahlian dalam menggunakan SIPKD membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dikuasai. Oleh karena itu, perlu ada program pelatihan berkelanjutan yang dapat membantu pengguna mengatasi kesulitan teknis dan memaksimalkan penggunaan sistem.

Selain itu, implementasi SIPKD juga menghadapi kendala terkait dengan komunikasi dan koordinasi antar unit kerja. Dalam beberapa kasus, meskipun data keuangan dapat diproses dengan baik melalui sistem, masalah muncul dalam hal pemahaman dan interpretasi data antara

berbagai pihak yang terlibat. Beberapa petugas dari unit lain di luar pengelola keuangan sering kali tidak memahami alur kerja yang berlaku dalam SIPKD. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sering terjadi miskomunikasi mengenai prosedur input data, pengeluaran anggaran, dan penyusunan laporan yang tepat waktu. Meskipun sistem ini telah dilengkapi dengan fitur yang memungkinkan koordinasi antar unit, ketidakjelasan mengenai tanggung jawab masing-masing pihak menjadi hambatan dalam implementasi sistem yang efektif. Oleh karena itu, penguatan komunikasi antar unit kerja sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama mengenai prosedur yang harus dilaksanakan.

Selain masalah komunikasi, masalah terkait dengan kesiapan infrastruktur teknologi juga turut mempengaruhi implementasi SIPKD. Pada Kecamatan Dukun, beberapa unit kerja masih menggunakan perangkat keras yang kurang memadai, yang dapat memperlambat proses pengolahan data. Walaupun sebagian besar unit kerja telah dilengkapi dengan komputer dan perangkat keras lainnya, namun kekurangan pada kualitas jaringan internet dan perangkat yang lebih tua masih menjadi masalah yang sering dikeluhkan oleh pengguna. Keberhasilan implementasi SIPKD sangat bergantung pada stabilitas infrastruktur teknologi, sehingga perlu adanya pembaruan perangkat dan peningkatan kualitas jaringan internet untuk mendukung kelancaran sistem ini.

Meskipun terdapat sejumlah tantangan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi SIPKD di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik secara keseluruhan telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Peningkatan efisiensi dalam proses pelaporan, akurasi data yang lebih baik, serta pengurangan kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan merupakan beberapa keuntungan utama yang diperoleh. Ke depannya, dengan peningkatan pelatihan, komunikasi antar unit, dan pembenahan infrastruktur teknologi, diharapkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat terus meningkat, dan SIPKD dapat berfungsi sebagai alat yang efektif dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

2. Faktor Pendukung Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, beberapa langkah yang diambil dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi lapangan dan survei. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor pendukung yang sangat berperan dalam keberhasilan implementasi SIPKD di Kantor Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa komunikasi yang aktif merupakan salah satu faktor pendukung utama dalam implementasi SIPKD di Kecamatan Dukun. Sosialisasi yang baik antara atasan dan pegawai, serta antar sesama pegawai, menjadi kunci utama dalam kelancaran penggunaan sistem ini. Proses komunikasi yang efektif memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat memahami tujuan, prosedur, dan manfaat dari penggunaan SIPKD, sehingga dapat mengurangi hambatan dalam pelaksanaan.

b) Sumber Daya Manusia

Faktor lain yang sangat mendukung implementasi SIPKD adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kecamatan Dukun. Pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah telah memiliki kemampuan dan keahlian yang cukup dalam mengoperasikan sistem.

Peningkatan keahlian ini diperoleh melalui berbagai pelatihan, diskusi teknis, serta koordinasi yang intens antara pimpinan dan staf. Pelatihan yang berkelanjutan membantu meningkatkan pemahaman serta keterampilan pegawai dalam menggunakan SIPKD, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.

c) Disposisi

Sikap positif dan kesiapan para pegawai untuk menerima dan melaksanakan kebijakan terkait SIPKD juga menjadi faktor pendukung yang penting. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai merasa bahwa sistem ini mempermudah dan mempercepat proses pelaporan manajemen barang daerah. Keberhasilan implementasi SIPKD di Kecamatan Dukun sangat dipengaruhi oleh disposisi implementor yang antusias dan merasa bahwa sistem ini membuat pekerjaan mereka lebih efektif dan efisien. Sikap terbuka terhadap perubahan ini mempercepat proses adaptasi dan mengurangi resistensi terhadap sistem baru.

d) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang ada juga turut mempengaruhi efektivitas implementasi SIPKD. Hasil wawancara mengungkapkan bahwa kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama yang baik antar berbagai pihak. Jika struktur birokrasi tidak mendukung kebijakan tersebut, maka akan ada potensi ketidakefektifan dalam pengelolaan sumber daya dan kurangnya motivasi untuk melaksanakan kebijakan. Untuk itu, diperlukan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih fleksibel dan fragmentasi tugas yang jelas, dengan melibatkan organisasi yang kompeten dan kapabel. Dengan adanya struktur yang lebih mendukung, implementasi SIPKD dapat berjalan lebih lancar dan mencapai hasil yang optimal.

3. Faktor Penghambat Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

Selama implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, terdapat beberapa faktor penghambat yang cukup signifikan. Salah satu masalah utama yang ditemukan adalah keterbatasan kapasitas *bandwidth server* yang digunakan untuk menjalankan aplikasi SIPKD. Ketika banyak pengguna mengakses aplikasi secara bersamaan, proses menjadi sangat lambat bahkan sering kali aplikasi mengalami error. Hal ini mengakibatkan operator kesulitan dalam menginput data secara efisien dan menghambat kelancaran operasional sistem. Sebagai solusi sementara, operator terpaksa pergi ke pusat server yang berada di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) untuk mempercepat proses input data. Pada kondisi tertentu, operator bahkan harus menginap di kantor BPKD untuk menyelesaikan pekerjaan mereka, yang tentu saja mempengaruhi produktivitas dan menambah beban kerja mereka.

Selain masalah *bandwidth*, kendala lain yang menghambat efektivitas penggunaan SIPKD adalah tidak adanya sistem peringatan (*warning system*) yang dapat memberi tahu operator ketika terjadi kesalahan dalam proses input data. Tanpa adanya fitur peringatan otomatis, jika terjadi kesalahan dalam penginputan data, laporan yang dihasilkan menjadi tidak akurat. Untuk memperbaikinya, operator harus mengulang seluruh proses dari awal hingga akhir, yang mengakibatkan pemborosan waktu dan tenaga. Proses pembetulan yang memakan waktu ini bertentangan dengan tujuan utama penerapan SIPKD, yaitu untuk mempercepat proses pengolahan dan pelaporan data secara lebih efisien. Sebaliknya, aplikasi SIPKD yang tidak dilengkapi dengan fitur peringatan justru menambah beban kerja operator dan memperlambat kinerja keseluruhan.

Selain itu, terdapat juga masalah terkait dengan kurangnya dukungan

infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung kelancaran operasional aplikasi SIPKD. Infrastruktur jaringan yang tidak stabil dan kurangnya pembaruan perangkat keras menyebabkan beberapa unit kerja mengalami kesulitan saat mengakses dan menggunakan aplikasi ini. Jaringan internet yang sering putus-putus dan perangkat keras yang ketinggalan zaman semakin memperburuk kondisi, sehingga mengurangi efektivitas sistem secara keseluruhan. Keandalan dan kestabilan infrastruktur sangat penting untuk memastikan aplikasi SIPKD berjalan dengan lancar dan dapat digunakan secara optimal oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah.

Secara keseluruhan, meskipun SIPKD memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, beberapa faktor penghambat tersebut mengurangi efektivitas sistem ini. Untuk itu, dibutuhkan perbaikan yang lebih menyeluruh dalam hal infrastruktur teknologi, peningkatan kapasitas server, serta pengembangan fitur-fitur tambahan seperti sistem peringatan otomatis untuk mendeteksi kesalahan input. Dengan adanya perbaikan tersebut, diharapkan SIPKD dapat berfungsi dengan lebih optimal dan mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien dan akuntabel.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, dapat disimpulkan bahwa:

a) Implementasi SIPKD memberikan dampak positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, dengan meningkatkan akurasi data dan efisiensi waktu dalam proses penyusunan laporan. Penggunaan sistem ini menggantikan proses manual yang lambat dan rawan kesalahan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.
b) Komunikasi yang kurang efektif antara unit kerja menjadi salah satu kendala dalam implementasi SIPKD. Miskomunikasi mengenai prosedur dan tanggung jawab masing-masing pihak menghambat kelancaran penggunaan sistem. Penguatan komunikasi antar unit kerja dan penjelasan yang jelas mengenai alur dan tanggung jawab masing-masing sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi.
c) Dampak Positif Secara Keseluruhan Secara keseluruhan, implementasi SIPKD di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik berhasil meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas laporan keuangan. Meskipun ada beberapa tantangan, dampak positif yang dihasilkan jauh lebih besar, dan diharapkan sistem ini dapat terus berkembang menjadi alat yang efektif untuk pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.

Kesimpulannya, meskipun implementasi SIPKD menghadapi beberapa kendala, sistem ini telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah. Diperlukan perbaikan lebih lanjut dalam hal pelatihan SDM, komunikasi antar unit, serta peningkatan infrastruktur untuk memaksimalkan manfaat dari implementasi SIPKD.

2. Rekomendasi

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi SIPKD di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, diantaranya:

a) Perlu dilakukan program pelatihan yang lebih intensif dan berkelanjutan bagi pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam mengoperasikan sistem SIPKD.

Pelatihan ini harus mencakup pemahaman mendalam mengenai prosedur, serta penguasaan teknis yang lebih baik untuk meminimalkan kesalahan dalam penggunaan sistem.

b) Untuk mengatasi masalah komunikasi dan koordinasi antar unit kerja, sangat penting untuk memperkuat alur komunikasi di antara seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah. Sosialisasi yang lebih intensif mengenai prosedur dan tanggung jawab masing-masing pihak dapat membantu mengurangi miskomunikasi yang terjadi.

c) Terkait dengan masalah infrastruktur, rekomendasi utama adalah melakukan pembaruan perangkat keras dan meningkatkan kapasitas bandwidth server agar aplikasi SIPKD dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Kualitas jaringan internet yang lebih baik akan sangat mendukung kelancaran pengolahan data dan meningkatkan produktivitas pegawai.

d) Penting untuk menambahkan fitur-fitur seperti sistem peringatan otomatis dalam aplikasi SIPKD untuk memberikan notifikasi kepada operator saat terjadi kesalahan input data. Hal ini akan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki kesalahan dan meningkatkan efisiensi operasional sistem secara keseluruhan.

Dengan melaksanakan rekomendasi-rekomendasi tersebut, diharapkan implementasi SIPKD di Kecamatan Dukun dapat lebih optimal, meningkatkan kualitas laporan keuangan, serta mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.

REFERENSI

Aguspita. (2019). *Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Transparasi dan AKuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pmerintah Daerah Kota Medan*. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Anshori. (2018). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Ketepatan waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi empiris pada SKPS pemerintah Kabupaten Bantu). *Jurnal Ekobis Dewantara, 1*(1), 1–22.

Asih. (2021). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada OPD Kabupaten Gianyar. *Hita Akuntansi dan Keuangan, 2*(2), 65–78.

Asiah. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung. *Skripsi*. Universitas Komputer Indonesia.

Baguswani. (2020). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompentensi Sumber Daya Manusia, Pemahaman Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implementasi Standart Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Skripsi*. Universitas Pancasakti Tegal.

Chucuk. (2021). Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Magetan. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Defitri, S. Y. (2014). Eksplorasi Kebutuhan Stakeholders Terhadap Informasi Dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Media Ekonomi, 22*(1), 53–72. https://doi.org/10.25105/me.v22i1.2817.

Fahirah. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Skripsi*. Universitas Pakuan.

Ginting. (2019). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keunagan Pemerintah daerah (Studi kasus pada dinas PU Provinsi Sumatera Utara). *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara.

Gunadi. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar.

Hendri, A. (2020). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah dan Penerapan Standart Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, *2*(1), 83–98.